

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan yang tidak lepas dari pro dan kontra. Adanya penolakan dari kebijakan tersebut memang hal yang sudah biasa dan beresiko, karena tidak ada kebijakan yang tidak beresiko. Dengan adanya implementasi kebijakan menentukan suatu proses kebijakan tersebut.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2015: 148) menyatakan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Grindle (dalam Winarno 2015:146) mengatakan bahwa Implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2015:146) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan juga terperinci.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2015:21) kebijakan merupakan arahan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut pendapat Friedrich dalam Winarno (2015:20) menyatakan bahwa Kebijakan adalah kebijakan sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut James Anderson dalam Agustino (2016:17) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan ialah suatu tindakan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok atau pemerintahan yang mempunyai cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud dalam mencapai sasaran atau maksud tertentu.

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda.

Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2015:20) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut Presman dan Wildavsky (dalam Winarno, 2015:22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut Easton (dalam Agustino, 2016:16), kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2015:36-37) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan

Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Dalam kaitannya dengan tahap-tahap kebijakan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kebijakan publik untuk memudahkan dalam mengkaji sebuah proses kebijakan maka terdapat tahap-tahap dalam kebijakan publik. Tahap-tahap tersebut untuk mengkaji kebijakan publik agar lebih mudah.

2.2.3 Pendekatan Dalam Kebijakan Publik

Pendekatan dalam kebijakan publik menjadi sangat penting. Ia tidak hanya menjelaskan mengenai pendekatan dalam kebijakan apa saja tetapi menerangkan mengenai dinamika di dalam proses pengambilan keputusan.

1. Pendekatan Kelompok. Pendekatan ini beranggapan bahwa seorang individu memiliki kepentingan sama dengan bergabung dan membentuk kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Sedangkan kelompok lainnya yang mempunyai kepentingan sendiri akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk bisa menghasilkan kebijakan yang diinginkan. Kelebihan pendekatan ini adalah memunculkan kelompok-kelompok yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi individu anggota kelompoknya. Sedangkan kelemahannya adalah terjadinya tumpang tindih kepentingan dan adanya persaingan yang tidak sehat terhadap proses perumusan kebijakan publik.

2. Pendekatan Fungsional. Model pendekatan ini merupakan pendekatan yang selalu digunakan dalam studi kebijakan publik. Model pendekatan ini dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada setiap kegiatan fungsional yang dilakukan dalam proses kebijakan publik. Ada beberapa kategori pendekatan kebijakan fungsional yang bisa digunakan dalam pembahasan ini menurut Harold Laswell, yaitu:

- 
- a) Intelegensi, yaitu bagaimana informasi tentang masalah kebijakan menjadi perhatian bagi para aktor kebijakan di dapat, dikumpulkan dan kemudian diproses.
 - b) Rekomendasi, yaitu bagaimana rekomendasi atau alternatif dalam mengatasi masalah.
 - c) Aplikasi, yaitu bagaimana regulasi diberlakukan di dalam masyarakat.
 - d) Penilaian, yaitu bagaimana sebuah kebijakan yang dijalankan dinilai keberhasilannya dan juga kegagalannya.
 - e) Terminasi, yaitu bagaimana regulasi sebelumnya dilanjutkan dengan diubah atau diberhentikan.

Dalam pendekatan ini ada beberapa keuntungan yang bisa dilihat, yaitu: tidak adanya keterkaitan dengan lembaga pemerintah ataupun peraturan politik serta dapat memberikan analisis komparasi kebijakan publik. Sedangkan kelemahannya adalah mengabaikan proses pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel lingkungan.

3. Pendekatan Kelembagaan. Asumsi yang dikembangkan oleh pendekatan kelembagaan adalah bahwa suatu kebijakan diambil, dilaksanakan, dan dijalankan dengan paksaan oleh pemerintah. Pendekatan model ini memiliki ciri yaitu pembuat kebijakan mempunyai legitimasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan serta mampu memonopoli semua masyarakat. Kelemahan pendekatan ini adalah kurangnya perhatian terhadap hubungan antar lembaga pemerintah dan tidak adanya substansi dari kebijakan publik.

4. Pendekatan Peran Serta Warga Negara. Pendekatan ini didasari oleh pemikiran demokrasi klasik yang dikemukakan oleh John Locke dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat bahwa adanya pengaruh yang baik dari peran masyarakat dalam perkembangan kebijakan publik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam memecahkan permasalahan publik, maka masyarakat akan memahami dan memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan mereka. Adanya peran masyarakat didasari pada harapan yang tinggi terhadap persoalan masyarakat dan adanya keinginan untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka

dibutuhkan masyarakat yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan fungsi demokrasi.

5. Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini berhubungan dengan kejiwaan yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan. Studi psikologi telah memberikan banyak kontribusi kepada proses pembuatan keputusan. Sehingga, pengabaian pendekatan psikologi terhadap analisis kebijakan akan menghambat proses kebijakan dibuat.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya pendekatan kebijakan ini dapat membantu dan memahami proses pembuatan maupun pengembangan berbagai teoritis untuk membantu dalam memahami dan mempelajari perilaku sistem politik.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan

publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Mazmania dan Sabatier (dalam Agustino 2016:128) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2015:149) mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Barret (dalam Agustino 2016:128) mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri.

2.3.2 Model Proses Implementasi Kebijakan Donald van Metter & Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan

kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di

antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi merupakan sebuah performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai implementasi kebijakan publik yang baik. Untuk mendapatkan implementasi kebijakan publik yang baik terdapat model pendekatan yang mampu menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan.

1.4 Penertiban Pedagang Kaki Lima

2.4.1 Pengertian Penertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administratif.

Istilah penertiban diawali dengan kata “tertib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata “tertib” yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang – undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

2.4.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

Secara keseluruhan, dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai konseptualisasi sektor informal bahwa sektor informal pedagang kaki lima perkotaan tidak saja merupakan pelebagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelebagaan sosial, yaitu keadaan integral baik internal maupun eksternal, dan beragam faktor baik sosial ekonomi, politik, maupun budaya pada masyarakat modern industrial perkotaan.

2.4.3 Pengertian Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penertiban pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.

Pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban kota, misal karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap telah merenggut hak publik atas ruang terbuka, serta keberadaannya dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha pada tempat yang layak.